

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam masyarakat yang berkeadilan, setiap individu, termasuk lansia dan penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Salah satu aspek fundamental dalam pemenuhan hak tersebut adalah kecukupan pangan yang bergizi dan seimbang. Kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama dalam berbagai kebijakan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemberdayaan kelompok rentan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki kualitas hidup yang baik dan tidak terpinggirkan dalam kehidupan sosial maupun ekonomi (Supriatna, 2020).

Pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, serta kebutuhan dasar seperti makanan. Di banyak negara maju, berbagai program sosial telah dikembangkan untuk memastikan kelompok ini mendapatkan hak-haknya secara optimal. Namun, di negara berkembang, masih banyak tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan, terutama dalam sektor pemenuhan kebutuhan pangan (Putri & Handayani, 2021).

Perubahan demografi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan, yaitu peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2023, jumlah lansia di Indonesia tercatat sebanyak 11,75% dari total populasi, sementara proyeksi penduduk menunjukkan bahwa rasio ketergantungan lansia mencapai angka 17,08. Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-59 tahun) harus menanggung sekitar 17 orang lansia (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini berada dalam fase "*ageing population*", yaitu negara dengan proporsi lansia yang semakin besar, yang bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah lansia ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang penting seperti pangan.

Fenomena serupa terjadi di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, di mana tercatat terdapat 58 lansia dan 31 penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori rentan dan menjadi sasaran program permakanan. Lansia yang sering mengalami penurunan fungsi tubuh, penurunan nafsu makan, serta gangguan metabolisme, memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan makanan yang tidak hanya mencukupi kalori, tetapi juga mengandung nutrisi yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Sementara itu, penyandang disabilitas, baik yang mengalami gangguan fisik maupun mental, sering kali kesulitan dalam mengakses

makanan bergizi karena keterbatasan mobilitas atau ketergantungan pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Selain lansia, penyandang disabilitas juga menjadi kelompok rentan yang tidak bisa diabaikan. Meskipun jumlah pasti penyandang disabilitas di Indonesia sulit untuk dipastikan, data yang ada mencatat bahwa sekitar 10% dari populasi Indonesia memiliki berbagai jenis disabilitas. Baik lansia maupun penyandang disabilitas, keduanya menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama pangan yang bergizi.

Dalam banyak kasus, lansia dan penyandang disabilitas tinggal dalam kondisi yang tidak mendukung kemandirian mereka, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan. Lansia yang tinggal sendiri, misalnya, kesulitan untuk membeli atau mempersiapkan makanan yang bergizi. Beberapa di antaranya tidak memiliki kemampuan fisik atau pengetahuan untuk mengolah makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Demikian pula, penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang sesuai dengan kondisi mereka. Situasi ini memunculkan masalah serius, seperti ketelantaran lansia, kelaparan, malnutrisi, dan bahkan kematian yang tidak terdeteksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang dapat memastikan kedua kelompok ini mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan yang bergizi.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah dengan memberikan bantuan permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas yang berada dalam kondisi rentan, terutama mereka yang tinggal dalam

keluarga tunggal atau tanpa dukungan keluarga yang memadai. Pemberian bantuan pangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar pangan mereka tetap tercukupi dan menghindari risiko kelaparan atau malnutrisi yang dapat berakibat fatal. Namun, pemberian bantuan pangan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Pelaksanaan program permakanan harus dilakukan secara tertib, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Bantuan permakanan merupakan salah satu program strategis yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tujuan untuk membantu kelompok masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya dalam hal pemenuhan gizi. Kelompok rentan yang menjadi sasaran program ini meliputi lansia dan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan ekonomi dan kesulitan dalam mengakses makanan yang layak dan bergizi. Program ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat serta mendorong terciptanya ketahanan pangan berbasis komunitas.

Dalam implementasinya, bantuan permakanan ini disalurkan melalui bidang pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai fasilitator utama dalam memastikan distribusi bantuan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah melibatkan kelompok masyarakat lokal dalam pelaksanaan program. Di Tanjungsari, terdapat dua kelompok masyarakat aktif, yaitu Kelompok Masyarakat Sauyunan dan Kelompok Masyarakat Barokah, yang berasal dari unsur

PKK, RT/RW, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Bidang pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab untuk merancang mekanisme pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Untuk mendukung efektivitas program, bidang pemberdayaan masyarakat tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di daerah mereka masing-masing. Kerja sama ini bertujuan agar distribusi bantuan permakanan dapat dilakukan secara lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan sasaran, serta memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak menerima.

Dalam proses implementasi, kelompok masyarakat turut serta dalam berbagai tahapan, mulai dari pendataan penerima manfaat, penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan, hingga pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan berbasis komunitas ini dirancang untuk menciptakan sistem yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam membantu sesama. Melalui keterlibatan langsung, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama, menciptakan solidaritas sosial, serta membangun sistem ketahanan pangan berbasis komunitas yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gotong royong dalam menangani permasalahan sosial. Dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam proses penyediaan dan distribusi makanan, program ini turut membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha berbasis sosial, seperti katering komunitas, warung makan gotong royong, atau koperasi pangan yang dikelola secara mandiri. Hal ini secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan perekonomian lokal, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam tentang peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan program permakanan. Dengan memahami lebih jauh dinamika yang terjadi dalam implementasi program ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian dengan menggunakan metode Community-Based Research (CBR), yaitu pendekatan yang melibatkan komunitas secara aktif dalam setiap tahap penelitian. Pendekatan ini dipilih agar analisis mengenai pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas dalam program permakanan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata serta kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **"Pemberdayaan Lansia dan Disabilitas dalam Pelaksanaan Permakanan melalui Kelompok Masyarakat."** Judul ini dipilih untuk menyoroti aspek pemberdayaan yang menjadi inti dari program ini, serta

menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang efektif untuk meningkatkan akses lansia dan disabilitas terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau?
2. Bagaimana peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan lansia dan disabilitas terkait pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat dalam penerimaan makanan oleh lansia dan disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang efektif untuk meningkatkan akses lansia dan disabilitas terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau.
2. Menganalisis peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan lansia dan disabilitas terkait pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi.
3. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat dalam penerimaan makanan oleh lansia dan disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara akademis dan praktis.

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan terkait pemberdayaan masyarakat, terutama dalam aspek pemenuhan gizi yang tepat bagi lansia dan penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang strategi pemberdayaan masyarakat, serta menjadi referensi untuk studi lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, program pemberdayaan ini membantu masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam penyediaan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi lansia dan disabilitas, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, pemberdayaan ini juga memperkuat hubungan sosial dalam komunitas dan memberikan peluang ekonomi melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teoritis

Pemberdayaan, sebagai istilah, berasal dari kata dasar "daya," yang menggambarkan kekuatan, kemampuan, atau potensi yang dimiliki seseorang atau kelompok. Dalam ranah pemberdayaan masyarakat, istilah ini merujuk pada usaha sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat individu atau kelompok yang

berada dalam kondisi rentan. Melalui pemberdayaan, individu diarahkan untuk menemukan kemampuan internal mereka dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Zubaedi (2013) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses pengembangan kapabilitas masyarakat yang mencakup langkah-langkah untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki oleh mereka agar mampu bekerja keras demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan (Zubaedi, 2013: 24–25).

Sumodiningrat berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan rangkaian dukungan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dukungan ini juga mencakup perluasan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat mencapai kemandirian yang berkelanjutan, sehingga tidak bergantung pada bantuan pihak luar (Sartika, 2018: 24). Dalam konteks ini, pemberdayaan memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kolektif masyarakat untuk mencapai keberlanjutan.

Pemberdayaan berakar pada asumsi bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan struktur sosial yang tidak adil. Menurut Suharto (2010: 60), pemberdayaan memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses,

pemberdayaan mencakup serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok-kelompok yang rentan, terutama mereka yang mengalami masalah kemiskinan dan keterpinggiran sosial. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengacu pada hasil akhir yang diinginkan, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki kekuatan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri secara mandiri dan produktif (Suharto, 2010: 60).

Asumsi lain yang mendasari pemberdayaan adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk berkembang dan memperoleh kesempatan yang sama. Dalam proses pemberdayaan, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat bahwa mereka memiliki hak untuk hidup lebih baik dan memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), yang menekankan bahwa pemberdayaan harus dilakukan secara sistematis melalui tahapan tertentu untuk memastikan efektivitasnya.

Pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga melibatkan proses yang kompleks dan berkesinambungan untuk menciptakan transformasi sosial. Proses pemberdayaan dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), tahap pertama adalah penyadaran (*conscientization*), di mana masyarakat diberikan pemahaman mengenai hak, potensi, dan kekuatan mereka sendiri. Tahap ini berfungsi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan diri dan kesadaran bahwa mereka mampu mengubah situasi hidup mereka.

Tahap kedua adalah pengkapasitasan (*capacity building*), yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu atau kelompok agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pada tahap ini, masyarakat diberi pelatihan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tahap ini sering kali dianggap sebagai inti dari pemberdayaan karena melibatkan transfer pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan.

Tahap ketiga adalah pemberian daya (*empowerment*), yang mencakup tindakan nyata untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini, pemberian daya tidak hanya berfokus pada penguatan individu tetapi juga mencakup transformasi sosial yang lebih luas. Misalnya, melalui kebijakan yang mendukung pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga masyarakat secara kolektif dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007).

2. Landasan Konseptual

a. Lansia

Lansia, atau lanjut usia, adalah tahap akhir dalam kehidupan manusia yang biasanya terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) menyebutkan bahwa lansia ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan mental, yang sering membuat mereka lebih sulit untuk menjaga keseimbangan kesehatan. Lansia juga menghadapi tantangan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi di masa tua, seperti kondisi kesehatan yang

menurun dan berkurangnya kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Kemensos, 2021).

Selain itu, lansia sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan keluarga atau lingkungan sekitar. Hal ini membuat mereka rentan merasa terisolasi atau kesepian, terutama jika tidak tinggal bersama pasangan atau keluarga. Karena itu, lansia membutuhkan perhatian khusus, baik dari keluarga maupun masyarakat, agar mereka tetap merasa dihargai dan bisa menjalani sisa hidupnya dengan baik (Kemensos, 2021).

Dalam kehidupan sosial, istilah untuk lansia sering berbeda-beda, seperti "jompo," "manula," atau "wredha." Namun, semua istilah tersebut merujuk pada orang yang berada di usia lanjut. Sayangnya, beberapa istilah memiliki konotasi negatif yang dapat membuat lansia merasa kurang dihormati. Padahal, lansia masih memiliki potensi untuk berkontribusi dalam masyarakat jika mendapat dukungan yang tepat. Misalnya, melalui program layanan sosial seperti panti, lembaga kesejahteraan sosial (LKS), atau kegiatan berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia (Kemensos, 2021).

b. Disabilitas

Disabilitas, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada kondisi keterbatasan fisik dan mental yang dialami seseorang akibat penyakit atau cedera. Secara etimologis, istilah "disabilitas" berasal dari bahasa Inggris *disability*, yang berarti "ketidakmampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan cara yang biasa." Definisi ini menekankan bahwa disabilitas bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga terkait dengan

hambatan sosial yang menghalangi partisipasi penuh seseorang dalam masyarakat (Sinulingga, 2022: 9).

c. Permakanan

Permakanan adalah bentuk bantuan sosial yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan kepada kelompok rentan, seperti lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dirancang untuk memastikan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mendapatkan asupan makanan bergizi. Dalam pelaksanaannya, bantuan permakanan mencakup penyediaan makanan yang terdiri atas nasi atau makanan serupa, lauk pauk, sayuran, buah, dan air mineral. Paket makanan ini diberikan dua kali sehari melalui pengantaran langsung ke rumah penerima manfaat (Kemensos, 2023).

Sebagai tujuan utama, program permakanan diarahkan untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, khususnya dalam hal pangan dan nutrisi. Dalam konteks ini, bantuan permakanan diharapkan dapat mendukung kehidupan yang lebih layak. Pemerintah menetapkan indeks anggaran sebesar Rp30.000 per hari per orang untuk memenuhi kebutuhan makan sebanyak dua kali. Program ini juga menekankan pentingnya makanan yang higienis dan berkualitas untuk menunjang kesehatan para penerima manfaat (Kemensos, 2023).

Pelaksanaan program permakanan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilannya. Dalam konteks ini, Kementerian Sosial menjalin kerja sama dengan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang berperan penting

dalam mendampingi dan melaksanakan program di daerah masing-masing. Pendekatan ini memperkuat partisipasi masyarakat akar rumput sehingga menciptakan rasa kepemilikan terhadap program. Meski demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang memaksa prioritas wilayah penerima bantuan ditentukan secara selektif berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak (Kemensos, 2023).

Pada tahun 2022, program ini berhasil menjangkau ratusan ribu penerima manfaat. Untuk lansia tunggal, bantuan diterima oleh lebih dari 247.000 individu yang tersebar di 30 provinsi dan 240 kabupaten/kota, dengan dukungan dari ribuan kelompok masyarakat dan pendamping Linjamsos. Sementara itu, untuk penyandang disabilitas tunggal, lebih dari 36.000 orang telah menerima bantuan permakanan di 25 provinsi dan 194 kabupaten/kota. Data ini menunjukkan bagaimana program permakanan mampu menjangkau kelompok rentan secara luas meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan di beberapa daerah (Kemensos, 2023).

Dalam pelaksanaan program, kriteria penerima manfaat dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Bagi penyandang disabilitas, penerima manfaat diutamakan adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, bagi lansia tunggal, kriteria mencakup usia 75 tahun atau lebih serta memenuhi kriteria sosial-ekonomi yang serupa. Penetapan penerima manfaat dilakukan oleh camat atau kepala distrik setempat sebagai pihak yang berwenang (Kemensos, 2023).

d. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan sekumpulan individu yang memiliki kepedulian serta tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kelompok ini terbentuk berdasarkan nilai-nilai solidaritas, gotong royong, dan kepedulian terhadap kondisi sosial di lingkungan mereka. Dalam konteks pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Mereka tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi informasi dan pengalaman, tetapi juga sebagai aktor utama dalam penyediaan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran (Suharto, 2005).

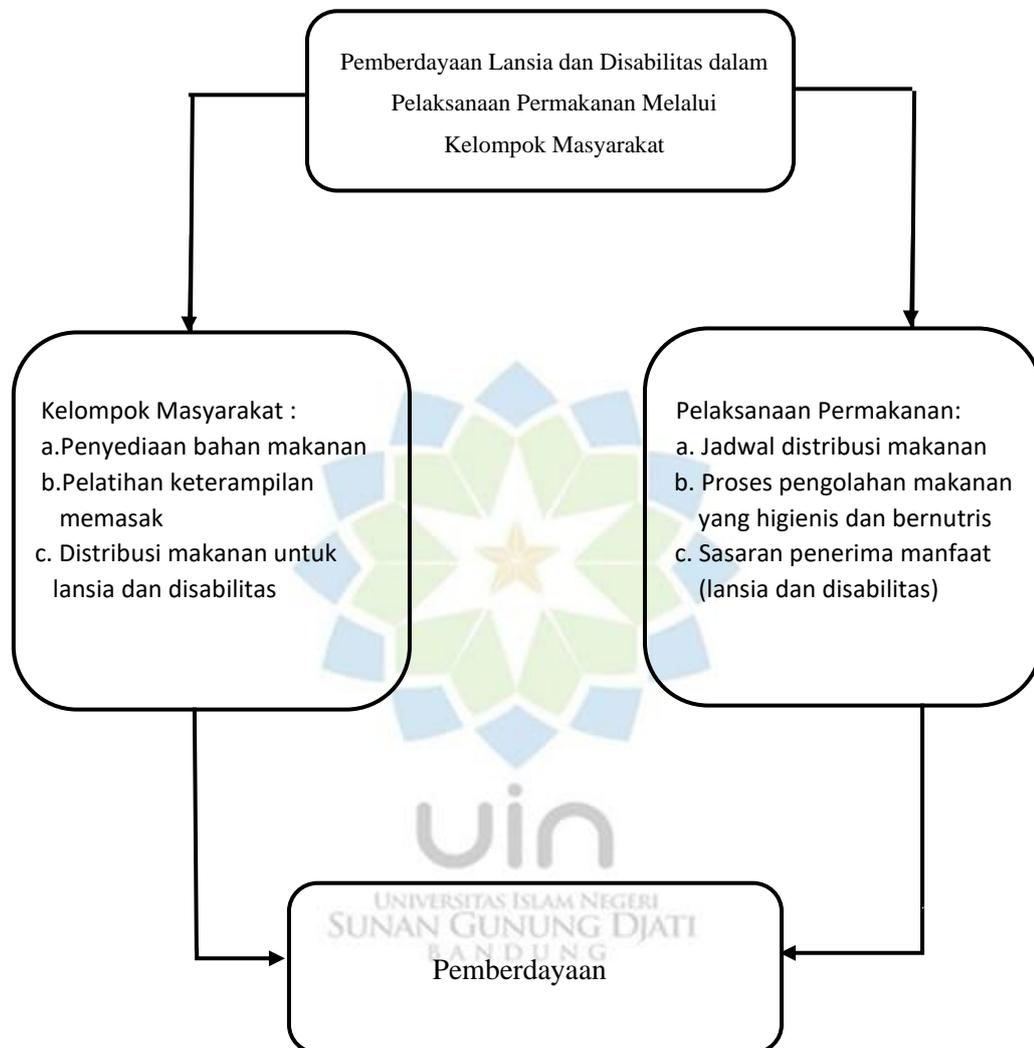
Kelompok masyarakat sering kali terdiri dari berbagai elemen, seperti organisasi berbasis komunitas, kelompok keagamaan, kelompok sosial, serta organisasi non-pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan lansia dan penyandang disabilitas. Pendekatan berbasis komunitas yang dijalankan oleh kelompok masyarakat menjadi strategi yang efektif dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan. Melalui pendekatan ini, program yang dijalankan dapat lebih menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat (Suharto, 2014). Selain sebagai penghubung antara pemerintah dan penerima manfaat, kelompok masyarakat juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dengan mengedepankan nilai-nilai empati dan kepedulian. Hal ini berkontribusi dalam membangun jaringan sosial yang lebih kuat dan mendukung keberlanjutan program pemberdayaan.

Peran kelompok masyarakat dalam pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek, seperti menjadi fasilitator yang menghubungkan pemerintah, donatur, dan penerima manfaat agar program permakanan dapat tersalurkan secara efektif. Mereka juga berfungsi sebagai pelaksana program yang bertanggung jawab dalam penyediaan bahan makanan, pengolahan makanan sesuai kebutuhan gizi lansia dan penyandang disabilitas, serta pendistribusiannya kepada penerima manfaat. Selain itu, kelompok masyarakat berperan sebagai penggerak partisipasi aktif masyarakat dengan mendorong keterlibatan sukarelawan, penyedia bahan makanan, serta tenaga pendukung dalam proses distribusi dan monitoring (Sumodiningrat, 1999). Mereka juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis komunitas dengan mengembangkan inisiatif seperti dapur umum komunitas, koperasi pangan, atau warung makan gotong royong yang dapat mendukung keberlanjutan program permakanan secara mandiri.

Dalam implementasi program permakanan, kelompok masyarakat terlibat dalam berbagai tahapan, mulai dari pendataan penerima manfaat, penyediaan dan pengolahan makanan yang sesuai dengan standar gizi, hingga distribusi makanan yang dilakukan secara efektif dan efisien melalui berbagai mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Mereka juga berperan dalam monitoring dan evaluasi program untuk memastikan keberjalanannya sesuai dengan tujuan serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi di lapangan (Effendi, 2018).

Dampak dari keterlibatan kelompok masyarakat dalam pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas tidak hanya terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dengan meningkatnya solidaritas sosial, masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kelompok rentan dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya gotong royong dalam menangani permasalahan sosial (Suharto, 2010). Selain itu, keterlibatan kelompok masyarakat juga membuka peluang ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis sosial, seperti katering komunitas dan koperasi pangan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut, mereka berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan menciptakan sistem yang lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas, sehingga keberlanjutan program ini dapat terjamin dalam jangka panjang.

F. Kerangka Konseptual



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa Kelompok Masyarakat (POKMAS) permakanaan tepatnya di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Lokasi ini

memiliki struktur sosial yang aktif, dengan berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, menjadikannya lokasi yang potensial untuk pelaksanaan penelitian terkait pemberdayaan masyarakat.

2. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang berorientasi pada pemahaman yang direkonstruksi tentang dunia sosial. Paradigma ini menekankan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan dibangun melalui pengalaman, interpretasi, dan pemaknaan individu serta kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian berjudul *Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pelaksanaan Permakanaan bagi Lansia dan Disabilitas*, pelaksanaan program permakanaan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh persepsi, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat setempat. Pemahaman mengenai kebutuhan pangan bergizi dan mekanisme pemberdayaan bergantung pada cara masyarakat membentuk makna atas permasalahan tersebut, serta bagaimana mereka mengartikulasikan solusi melalui upaya kolektif kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2018), yang menyatakan bahwa paradigma konstruktivisme berfokus pada makna yang dibangun dari pengalaman dan pemaknaan individu dalam konteks sosial mereka (Denzin & Lincoln, 2018: 196-197).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2007: 4), menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, metode

ini tidak bergantung pada statistik, melainkan berfokus pada eksplorasi pengalaman dan pandangan responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat, seperti kelompok masyarakat, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola pemberdayaan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Menurut Sujdarwo (2011: 25), pendekatan kualitatif didasarkan pada realitas yang terjadi di lapangan, di mana pengalaman dan perspektif responden menjadi rujukan untuk menemukan teori yang relevan. Dalam konteks ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian tahapan pemberdayaan seperti penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya kepada masyarakat, yang bertujuan meningkatkan efektivitas program permakanan. Dengan demikian, pendekatan ini relevan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat mendukung keberlanjutan dan keberhasilan program permakanan bagi kelompok rentan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Community-Based Research (CBR), yang merupakan metode penelitian berbasis komunitas dengan menekankan kolaborasi aktif antara peneliti dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja dalam penelitian, bukan sekadar subjek. Dalam penelitian ini, pendekatan CBR diterapkan untuk

menganalisis dan mengembangkan program pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan layanan permakanan bagi lansia dan disabilitas. Pendekatan ini memungkinkan adanya interaksi dinamis antara komunitas dan peneliti sehingga solusi yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat (Ochocka, 2015:21).

Tahap pertama dalam pendekatan ini adalah peletakan dasar. Pada tahap ini, peneliti membangun hubungan dengan komunitas, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan selaras dengan aspirasi komunitas. Dalam konteks penelitian ini, komunitas yang terlibat adalah kelompok masyarakat yang telah atau berpotensi melaksanakan program permakanan. Proses peletakan dasar melibatkan dialog terbuka yang membantu peneliti memahami perspektif masyarakat dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap penelitian.

Tahap kedua adalah perencanaan penelitian, di mana peneliti dan masyarakat bersama-sama menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk berbagi pandangan mengenai peran yang dapat mereka ambil, strategi pemberdayaan yang paling efektif, serta kendala yang mungkin dihadapi. Proses ini mencerminkan esensi kolaborasi dalam pendekatan CBR, di mana masyarakat tidak hanya berpartisipasi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan penelitian.

Tahap ketiga melibatkan pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas masyarakat dalam melaksanakan program permakanan, wawancara mendalam dengan anggota komunitas serta penerima manfaat program (lansia dan disabilitas), dan dokumentasi terkait seperti

laporan kegiatan dan kebijakan lokal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pemberdayaan, tantangan yang dihadapi, serta potensi inovasi yang muncul dari komunitas.

Tahap terakhir adalah aksi atas temuan, yang menekankan pentingnya implementasi hasil penelitian dalam bentuk tindakan nyata di komunitas. Pada tahap ini, hasil penelitian disampaikan kembali kepada masyarakat melalui forum diskusi atau pertemuan komunitas. Temuan-temuan tersebut menjadi bahan refleksi bersama untuk menentukan langkah-langkah perbaikan ke depan. Dalam hal ini, masyarakat berperan aktif dalam mengadopsi rekomendasi hasil penelitian dan menerapkannya untuk memperkuat program permakanaan.

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat untuk mengelola program secara mandiri. Pendekatan ini juga memastikan bahwa penelitian memberikan dampak langsung yang berkelanjutan bagi kelompok masyarakat yang dilibatkan (Febrian, 2019:27).

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendalami pelaksanaan program permakanaan bagi lansia dan disabilitas melalui pemberdayaan kelompok masyarakat. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Wawancara akan dilakukan dengan informan utama seperti tokoh masyarakat, pengelola program, dan penerima manfaat (lansia dan disabilitas), untuk menggali perspektif mereka mengenai keberhasilan, tantangan, serta dampak program tersebut. Observasi partisipatif bertujuan untuk

memahami proses implementasi program secara langsung, sementara analisis dokumen akan mencakup kebijakan atau laporan yang mendasari program ini. Teknik pengumpulan data ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Rosyid (2015: 96-97), bahwa data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Arikunto (2010:172), sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data primer diperoleh langsung dari responden yang terlibat dalam pelaksanaan program permakanan, seperti kelompok masyarakat pelaksana, penerima manfaat (lansia dan disabilitas), serta pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam program ini. Sugiyono (2018:456) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen atau referensi yang relevan, seperti laporan kegiatan, kebijakan lokal terkait, dan data statistik tentang lansia dan disabilitas di wilayah penelitian. Sugiyono (2018:456) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, tetapi diperoleh melalui dokumen atau informasi yang sudah ada.

5. Informan atau Unit Analisis

Informan dalam penelitian ini mencakup tiga kategori utama. Pertama, kelompok masyarakat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program

permakanan. Mereka dipilih karena peran aktif mereka dalam pengelolaan program dan kemampuan untuk memberikan informasi yang mendalam terkait proses pemberdayaan. Kedua, lansia dan disabilitas sebagai penerima manfaat program, yang memberikan perspektif mengenai efektivitas dan relevansi program dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, pihak-pihak lain yang relevan, seperti perwakilan pemerintah lokal, tokoh masyarakat, atau organisasi non-pemerintah yang mendukung pelaksanaan program.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah aktivitas pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program permakanan. Menurut Morris (2017:166), unit analisis adalah keseluruhan hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. Dalam penelitian ini, unit analisis mencakup interaksi antaranggota kelompok masyarakat, pola koordinasi, pengambilan keputusan, serta dampak program terhadap lansia dan disabilitas.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga metode utama:

1. Observasi

Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kelompok masyarakat yang melaksanakan program permakanan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana kelompok ini berkoordinasi, menyelesaikan masalah, dan mengelola tantangan operasional. Observasi ini membantu mengungkap dinamika internal kelompok serta pola interaksi yang muncul dalam pelaksanaan program (Moleong, L. J. 2017).

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan anggota kelompok masyarakat, lansia, dan disabilitas yang menerima manfaat program. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap pihak yang terlibat. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi harapan dan rekomendasi mereka terhadap keberlanjutan program (Moleong, L. J. 2017).

3. Dokumentasi

Dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, rencana kerja, kebijakan lokal, serta data statistik digunakan sebagai sumber informasi tambahan. Studi dokumentasi ini memberikan gambaran konteks serta mendukung validitas data primer yang telah dikumpulkan (Bodgan, R., & Biklen, S. K. 2011).

Ketiga teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat komprehensif, akurat, dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder serta pendekatan partisipatif, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program permakanan.

7. Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa strategi, yaitu triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, dan pengecekan oleh anggota komunitas yang terlibat. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, teknik pengumpulan data, dan teori. Data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota kelompok masyarakat, lansia, dan disabilitas akan dibandingkan dengan

hasil observasi lapangan serta dokumen terkait untuk memastikan konsistensi informasi (Sugiyono, 2018:273).

Selain itu, peneliti melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan masukan dan pandangan lain yang dapat memperkaya analisis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi potensi bias subjektif peneliti. Selanjutnya, dilakukan member check, yaitu proses mengembalikan hasil temuan kepada komunitas yang diteliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan realitas di lapangan dan diterima oleh mereka.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dianalisis secara induktif, di mana peneliti memulai dari fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk menemukan pola, hubungan, dan makna. Langkah pertama dalam analisis adalah melakukan reduksi data, yaitu proses memilah dan menyederhanakan data yang relevan untuk fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi untuk memastikan efisiensi analisis (Miles & Huberman, 1994:10).

Langkah kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau visualisasi lainnya untuk memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana temuan penelitian diuji kembali dengan data yang telah dikumpulkan untuk memastikan akurasi dan koherensinya.

Peneliti juga mengacu pada model analisis CBR yang menitikberatkan pada kolaborasi komunitas dalam proses analisis. Data yang telah diolah akan dibagikan

kepada komunitas untuk mendapatkan masukan dan validasi, sehingga hasil akhirnya mencerminkan perspektif bersama antara peneliti dan komunitas (Ochocka, 2015:23)

